



**PENGARUH TARIF EFEKTIF PAJAK, BEBAN PAJAK  
TANGGUHAN, BEBAN PPH 21, DAN PAJAK FINAL  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
(Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Periode 2020 - 2023)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**HERMAWAN ALIAWINATA**

**20210100084**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**



**PENGARUH TARIF EFEKTIF PAJAK, BEBAN PAJAK  
TANGGUHAN, BEBAN PPH 21, DAN PAJAK FINAL  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
(Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Periode 2020 - 2023)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :**

**HERMAWAN ALIAWINATA**

**20210100084**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hermawan Aliawinata  
NIM : 20210100084  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban PPh  
21, dan Pajak Final terhadap Kinerja Keuangan  
(Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  
Periode 2020 - 2023)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 20 Maret 2025

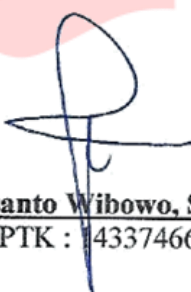
Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,

  
Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt  
NUPTK : 4740764665230302

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt  
NUPTK : 433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban PPh 21, dan Pajak Final terhadap Kinerja Keuangan (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2023).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Hermawan Aliawinata  
NIM : 20210100084  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 14 Juli 2025

Menyetujui,

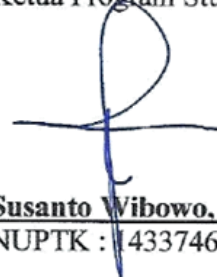
Pembimbing,



**Rina Apriliyanti, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 4740764665230302

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Hermawan Aliawinata

NIM : 20210100084

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban PPh 21, dan Pajak Final terhadap Kinerja Keuangan (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 - 2023)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,

Pembimbing,

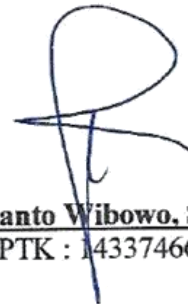


**Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 4740764665230302

Tangerang, 14 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Hermawan Aliawinata  
NIM : 20210100084  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban Pph 21, dan Pajak Final Terhadap Kinerja Keuangan (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025.

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Ketua Penguji

: **Sabam Simbolon, S.E., M.M.**  
NUPTK : 2539737638130052



Penguji I

: **Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 1433746647130352



Penguji II

: **Sutandi, S.E., M.Akt**  
NUPTK : 5956756657130122



Dekan Fakultas Bisnis,



**Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si**  
NUPTK : 9759751652230072



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma maupun di universitas lainnya.
2. Karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian original saya sendiri, dengan pengecualian pada arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.
3. Tidak terdapat karya atau pendapat orang lain dalam karya tulis ini yang telah diterbitkan atau dipublikasikan, kecuali telah disebutkan secara jelas dan tertulis sebagai referensi dalam naskah, dengan menyebutkan nama penulisnya serta mencantulkannya dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis berupa skripsi ini bebas dari unsur pemalsuan, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, maupun tanda tangan dosen, Ketua Jurusan, Dekan, atau Rektor Universitas Buddhi Dharma. Keaslian seluruh data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran dalam isi pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 14 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Hermawan Aliawinata

NIM : 20210100084

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh,

NIM : 20210100084

Nama : Hermawan Aliawinata

Jenjang Studi : Strata 1 (S1)

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Esklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “ **Pengaruh Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban Pph 21, dan Pajak Final Terhadap Kinerja Keuangan (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023).** “

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Esklusif ini, pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 05 September 2025

Penulis



Hermawan Aliawinata

NIM : 20210100084

**PENGARUH TARIF EFEKTIF PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN,  
BEBAN PPH 21, DAN PAJAK FINAL TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN**

**(Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode  
2020 - 2023)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh dari tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban pph 21, dan pajak final terhadap kinerja keuangan. Variabel bebas pada penelitian ini antara lain tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban pph 21, dan pajak final. Sementara variabel terikat pada penelitian ini ialah kinerja keuangan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023 selama 4 tahun, yang kemudian didapatkan sampel dengan memakai *purposive sampling* sebanyak 18 perusahaan atau 72 data. Penelitian ini memakai data sekunder yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 27 pada uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tarif efektif pajak dan pajak final berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara beban pajak tangguhan dan beban pph 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban pph 21, dan pajak final secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

**Kata Kunci : Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban Pph 21,  
Pajak Final, Kinerja Keuangan**

***THE EFFECT OF EFFECTIVE TAX RATES, DEFERRED TAX EXPENSES,  
PPH 21 EXPENSES, AND FINAL TAXES ON FINANCIAL  
PERFORMANCE***

***(Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the  
Period 2020 - 2023)***

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to empirically test the effect of effective tax rates, deferred tax burden, income tax article 21 burden, and final tax on financial performance. The independent variables in this study include effective tax rates, deferred tax burden, income tax article 21 burden, and final tax. While the dependent variable in this study is financial performance. The population used in this study is the food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2023 for 4 years, which were then obtained by using purposive sampling of 18 companies or 72 data. This study uses secondary data processed using SPSS version 27 in descriptive statistical tests, classical assumption tests, determination coefficient tests, multiple linear regression tests, and hypothesis tests. This study found that effective tax rates and final taxes have a significant effect on financial performance. While deferred tax burden and income tax article 21 burden do not have a significant effect on financial performance. Effective tax rates, deferred tax burden, income tax article 21 burden, and final taxes simultaneously affect financial performance.*

***Keywords : Effective Tax Rate, Deferred Tax Expense, Income Tax Article 21 Expense, Final Tax, Financial Performance***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kedua Orang tua saya atas berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban Pph 21, dan Pajak Final Terhadap Kinerja Keuangan (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)”** skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
4. Ibu Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, materi, nasehat, waktu serta

semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

5. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama masa kuliah.
6. Orang tua tercinta penulis sendiri yang selama ini telah mendoakan, mensupport, dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh teman-teman di Universitas Buddhi Dharma yang telah berbagi ilmu dan lain-lain selama delapan (8) semester menempuh pendidikan di Universitas Buddhi Dharma.
8. Saudara-saudara dan semua teman-teman penulis serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan . Maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 14 Juli 2025



Hermawan Aliwinata

## DAFTAR ISI

**JUDUL LUAR**

**JUDUL DALAM**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

**ABSTRAK..... i**

***ABSTRACT*.....ii**

**KATA PENGANTAR.....iii**

**DAFTAR ISI ..... v**

**DAFTAR TABEL..... ix**

**DAFTAR GAMBAR..... x**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... xi**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan Penelitian ..... 8

E. Manfaat Penelitian ..... 9

F. Sistematika Penulisan Skripsi ..... 10

<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Gambaran Umum Teori .....	13
1. kinerja keuangan (Y).....	13
2. Tarif Efektif Pajak ( $X_1$ ) .....	21
3. Beban Pajak Tangguhan ( $X_2$ ).....	28
4. Beban PPh 21 ( $X_3$ ).....	34
5. Pajak Final ( $X_4$ ).....	39
B. Hasil Penelitian Terdahulu .....	43
C. Kerangka Pemikiran .....	61
D. Perumusan Hipotesa .....	61
1. Tarif Efektif Pajak Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan .....	61
2. Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan .....	62
3. Beban PPh 21 Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan .....	63
4. Pajak Final Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan .....	64
5. Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban PPh 21, dan Pajak Final Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan .....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Jenis Penelitian .....	66
B. Objek Penelitian .....	67
C. Jenis dan Sumber Data.....	68

D. Populasi dan Sampel.....	70
1. Populasi .....	70
2. Sampel.....	74
E. Teknik Pengumpulan Data .....	76
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	78
1. Variabel Dependen (Y).....	79
2. Variabel Independen (X).....	80
G. Teknik Analisis Data.....	82
1. Uji Statistik Deskriptif.....	82
2. Uji Asumsi Klasik .....	84
3. Uji Statistik .....	86
4. Uji Hipotesis .....	88
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>91</b>
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	91
1. Sampel.....	91
2. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur.....	92
3. Kinerja Keuangan .....	93
4. Tarif Efektif Pajak .....	97
5. Beban Pajak Tangguhan .....	101
6. Beban Pph 21 .....	105
7. Pajak Final .....	109
B. Analisis Hasil Penelitian .....	112
1. Uji Statistik Deskriptif.....	113

2. Uji Asumsi Klasik .....	115
3. Uji Statistik .....	121
C. Pengujian Hipotesis .....	126
1. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....	126
2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	128
D. Pembahasan.....	129
1. Pengaruh Tarif Efektif Pajak terhadap Kinerja Keuangan .....	129
2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Keuangan..	131
3. Pengaruh Beban Pph 21 terhadap Kinerja Keuangan .....	132
4. Pengaruh Pajak Final terhadap Kinerja Keuangan .....	133
5. Pengaruh Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban Pph 21, dan Pajak Final terhadap Kinerja Keuangan.....	134
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>SURAT KETERANGAN RISET</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel III. 1	Daftar Nama Perusahaan Manufaktur.....	71
Tabel IV. 1	Proses Pemilihan Sampel.....	91
Tabel IV. 2	Daftar Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel.....	93
Tabel IV. 3	Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan.....	94
Tabel IV. 4	Hasil Perhitungan Tarif Efektif Pajak.....	97
Tabel IV. 5	Hasil Perhitungan Beban Pajak Tangguhan.....	102
Tabel IV. 6	Hasil Perhitungan Beban Pph 21.....	106
Tabel IV. 7	Hasil Perhitungan Pajak Final.....	109
Tabel IV. 8	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	113
Tabel IV. 9	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test.....	116
Tabel IV. 10	Hasil Uji Multikolinearitas.....	118
Tabel IV. 11	Hasil Uji Durbin-Watson.....	121
Tabel IV. 12	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	122
Tabel IV. 13	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	123
Tabel IV. 14	Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	126
Tabel IV. 15	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	129

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 .....	61
Gambar IV. 1 .....	117
Gambar IV. 2 .....	120



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel
- Lampiran 2 Perhitungan Tarif Efektif Pajak (ETR)
- Lampiran 3 Perhitungan Beban Pajak Tangguhan (DTE)
- Lampiran 4 Perhitungan Beban Pph 21
- Lampiran 5 Perhitungan Pajak Final
- Lampiran 6 Perhitungan Kinerja Keuangan (ROA)
- Lampiran 7 Tabel Distribusi Durbin-Watson
- Lampiran 8 Tabel Distribusi t
- Lampiran 9 Tabel Distribusi F
- Lampiran 10 Laporan Keuangan (Sebagian Sampel)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan perusahaan yang tidak hanya berperan sebagai kewajiban kepada negara, tetapi juga sebagai faktor penentu dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak memiliki fungsi ganda: sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat regulasi ekonomi. Bagi perusahaan, terutama yang berskala besar seperti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), pengelolaan pajak menjadi aspek strategis yang harus dirancang secara cermat. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya patuh terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga cakap dalam mengelola beban pajak agar tidak menekan profitabilitas (Fauzi et al., 2024).

Pengaruh pajak terhadap kondisi keuangan perusahaan bukan sekadar bersifat administratif, tetapi juga akuntabel dalam laporan keuangan. Hal ini tampak dari keberadaan berbagai jenis beban pajak yang diperlakukan berbeda dalam sistem akuntansi. Tarif efektif pajak (effective tax rate), misalnya, sering dijadikan tolak ukur efisiensi pajak karena mencerminkan persentase beban pajak yang benar-benar dibayarkan terhadap laba sebelum pajak. Ketika tarif efektif terlalu tinggi atau terlalu rendah dibanding tarif nominal, maka dapat timbul pertanyaan terkait manajemen pajak yang diterapkan perusahaan (Yahya et al., 2021).

Selain itu, terdapat pula beban pajak tangguhan (deferred tax expense) yang lahir dari perbedaan temporer antara akuntansi komersial dan fiskal. Pajak tangguhan bukan hanya sekadar angka dalam laporan, tetapi juga mencerminkan ekspektasi beban pajak masa depan akibat perlakuan akuntansi tertentu. Jika tidak dikelola dengan baik, komponen ini dapat menciptakan ilusi kinerja finansial yang menyesatkan. Sementara itu, PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan karyawan menjadi beban perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan legal dalam pengelolaan tenaga kerja. Beban ini, walaupun bersifat reguler, tetap memiliki pengaruh terhadap arus kas dan struktur biaya perusahaan. Tak kalah penting, pajak final yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang lainnya juga memberikan karakteristik unik dalam laporan keuangan, karena memengaruhi strategi penghasilan yang dikenakan pajak secara khusus (Winata & Winata, 2023).

Kinerja keuangan perusahaan, dalam konteks ini, tetap menjadi indikator fundamental untuk menilai daya saing dan keberlanjutan operasional. Rasio-rasio seperti return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan net profit margin (NPM) menjadi alat ukur utama dalam menentukan apakah perusahaan telah mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Beban pajak yang terlalu tinggi tanpa diimbangi strategi pengelolaan yang baik dapat menggerus laba bersih dan memperlemah posisi keuangan perusahaan. Sebaliknya, manajemen pajak yang sehat dan transparan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan

menjadi sinyal positif bagi investor maupun pemangku kepentingan lainnya (Alamsa et al., 2025).

Namun demikian, hubungan antara beban pajak dan kinerja keuangan bukanlah hubungan yang sederhana dan linier. Kompleksitasnya berasal dari berbagai faktor, termasuk strategi akuntansi pajak yang digunakan perusahaan, tingkat agresivitas fiskal, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang terus berkembang. Dalam banyak kasus, perusahaan dapat menggunakan strategi tertentu untuk menunda pengakuan beban pajak (seperti melalui pajak tangguhan), atau bahkan memanfaatkan tarif pajak final untuk kegiatan usaha tertentu yang secara fiskal lebih ringan. Hal ini menciptakan kebutuhan akan analisis yang tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kritis dalam memahami sejauh mana elemen-elemen pajak berkontribusi atau justru membebani performa keuangan perusahaan.

Kondisi ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan dinamika ekonomi yang terjadi pada periode 2020–2023, yaitu masa pasca-pandemi COVID-19. Pandemi telah membawa dampak besar terhadap hampir seluruh sektor industri, termasuk manufaktur, yang merupakan salah satu sektor dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selama masa pandemi, perusahaan manufaktur mengalami tekanan operasional, terganggunya rantai pasok, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pemerintah pun merespons dengan memberikan berbagai insentif pajak, perubahan tarif, serta penyesuaian kebijakan fiskal guna mendorong pemulihan ekonomi (Viola & Fitrianto, 2022).

Pasca-pandemi, perusahaan manufaktur menghadapi realitas baru: bagaimana kembali bangkit dengan struktur keuangan yang lebih sehat, sambil tetap mematuhi kewajiban perpajakan yang telah disesuaikan. Dalam konteks ini, pengaruh berbagai beban pajak terhadap kinerja keuangan menjadi isu yang krusial untuk diteliti. Apakah insentif atau penyesuaian pajak selama periode tersebut berhasil memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya. Ataukah justru masih ada beban struktural yang menghambat pemulihan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perpajakan menjadi salah satu aspek strategis yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan di sektor manufaktur. Hal ini dapat terlihat dari kasus yang dialami oleh PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF), perusahaan manufaktur pupuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2021, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp37,2 miliar, meningkat 18,45% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp31,4 miliar. Namun demikian, peningkatan pendapatan tersebut tidak sejalan dengan peningkatan laba bersih. Justru, laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari Rp2,3 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,8 miliar pada tahun 2021, atau turun sebesar 21,75%.

Penurunan laba bersih ini sebagian besar disebabkan oleh lonjakan beban pajak yang signifikan. Pada tahun 2021, perusahaan mencatatkan beban pajak kini sebesar Rp1,45 miliar dan beban pajak tangguhan sebesar Rp1,13 miliar, sehingga total beban pajak mencapai Rp2,59 miliar. Jika

dibandingkan dengan tahun 2020, di mana total beban pajak hanya Rp1,21 miliar, terjadi peningkatan sebesar Rp1,38 miliar, atau naik sekitar 113,7%. Peningkatan ini secara langsung berdampak terhadap laba perusahaan, mengingat pajak merupakan salah satu komponen signifikan dalam perhitungan beban usaha dan beban lain-lain.

Penelitian ini penting dilakukan karena mampu memberikan kontribusi akademik dengan menghadirkan kajian komprehensif mengenai pengaruh tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban PPh 21, dan pajak final terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur, yang sebelumnya masih jarang diteliti secara bersamaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pengelolaan pajak yang efisien agar kinerja keuangan tetap optimal tanpa mengurangi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan empiris mengenai efektivitas kebijakan pajak terhadap sektor manufaktur sebagai salah satu penopang PDB nasional. Selain itu, konteks pasca-pandemi 2020–2023 membuat penelitian ini semakin relevan karena pada periode tersebut perusahaan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesehatan keuangan sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban PPh Pasal 21, dan pajak final terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023. Dengan pendekatan ini,

diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik dan praktis mengenai pengelolaan pajak perusahaan dan dampaknya terhadap performa keuangan, sekaligus memberikan masukan bagi regulator dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih akomodatif dan adil di masa yang akan datang.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel independen seperti tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban pph 21, dan pajak final memberikan pengaruh yang beragam terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan. Beberapa variabel menunjukkan pengaruh positif, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban pph 21, dan pajak final memengaruhi kinerja keuangan, yang menjadi alasan utama penulis melakukan penelitian dengan judul: **"PENGARUH TARIF EFEKTIF PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, BEBAN PPH 21, DAN PAJAK FINAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2023"**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya ketidakpastian terkait seberapa besar pengaruh tarif efektif pajak terhadap profitabilitas dan efisiensi keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2020–2023.
2. Adanya perbedaan pengakuan akuntansi yang memunculkan beban pajak tangguhan, yang berpotensi memengaruhi akurasi dan stabilitas laporan keuangan perusahaan manufaktur.
3. Adanya beban PPh Pasal 21 sebagai komponen biaya tenaga kerja yang dapat memengaruhi struktur biaya dan profitabilitas perusahaan manufaktur selama periode pasca-pandemi.
4. Adanya karakteristik khusus pajak final yang bersifat tidak dapat dikreditkan, sehingga perlu dikaji dampaknya terhadap efisiensi fiskal dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur.
5. Adanya kebutuhan untuk mengetahui bagaimana keempat komponen pajak tersebut secara simultan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang beroperasi dalam kondisi ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif efektif pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023?

2. Apakah beban pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur pada periode tersebut?
3. Apakah beban PPh Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur?
4. Apakah pajak final berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur selama periode 2020–2023?
5. Apakah keempat variabel pajak tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban PPh Pasal 21, dan pajak final secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pasca-pandemi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh tarif efektif pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023.
2. Untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur pada periode yang sama.
3. Untuk menguji pengaruh beban PPh Pasal 21 terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur.
4. Untuk menguji pengaruh pajak final memengaruhi kinerja keuangan perusahaan manufaktur selama periode 2020–2023.

5. Untuk menguji pengaruh simultan tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban PPh Pasal 21, dan pajak final terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di masa pasca-pandemi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai hubungan antara elemen-elemen pajak dan kinerja keuangan perusahaan. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dinamika beban pajak dalam konteks efisiensi keuangan perusahaan, terutama di sektor manufaktur.

2. **Manfaat Praktis**

Bagi Kalangan Akademis, Penelitian ini dapat digunakan sebagai studi kasus empiris yang mengintegrasikan aspek akuntansi pajak dengan analisis kinerja keuangan. Hal ini dapat membuka ruang diskusi dalam perkuliahan, seminar ilmiah, maupun tugas akhir mahasiswa yang ingin mengeksplorasi hubungan antara regulasi fiskal dan kondisi keuangan perusahaan secara lebih kontekstual dan mutakhir

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh.

4. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dalam menilai kinerja dan efisiensi fiskal perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi.

5. Bagi Regulator (Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas kebijakan perpajakan yang berlaku selama dan setelah pandemi, serta sebagai masukan dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan sektor industri.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, maka skripsi disusun ke dalam lima bab utama dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Tujuannya adalah memberikan

konteks awal mengenai pentingnya topik yang diteliti serta arah dan ruang lingkup penelitian.

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang mendasari variabel-variabel penelitian, kajian literatur terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran konseptual serta hipotesis penelitian. Teori yang dibahas mencakup akuntansi pajak, teori agensi, serta konsep kinerja keuangan.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

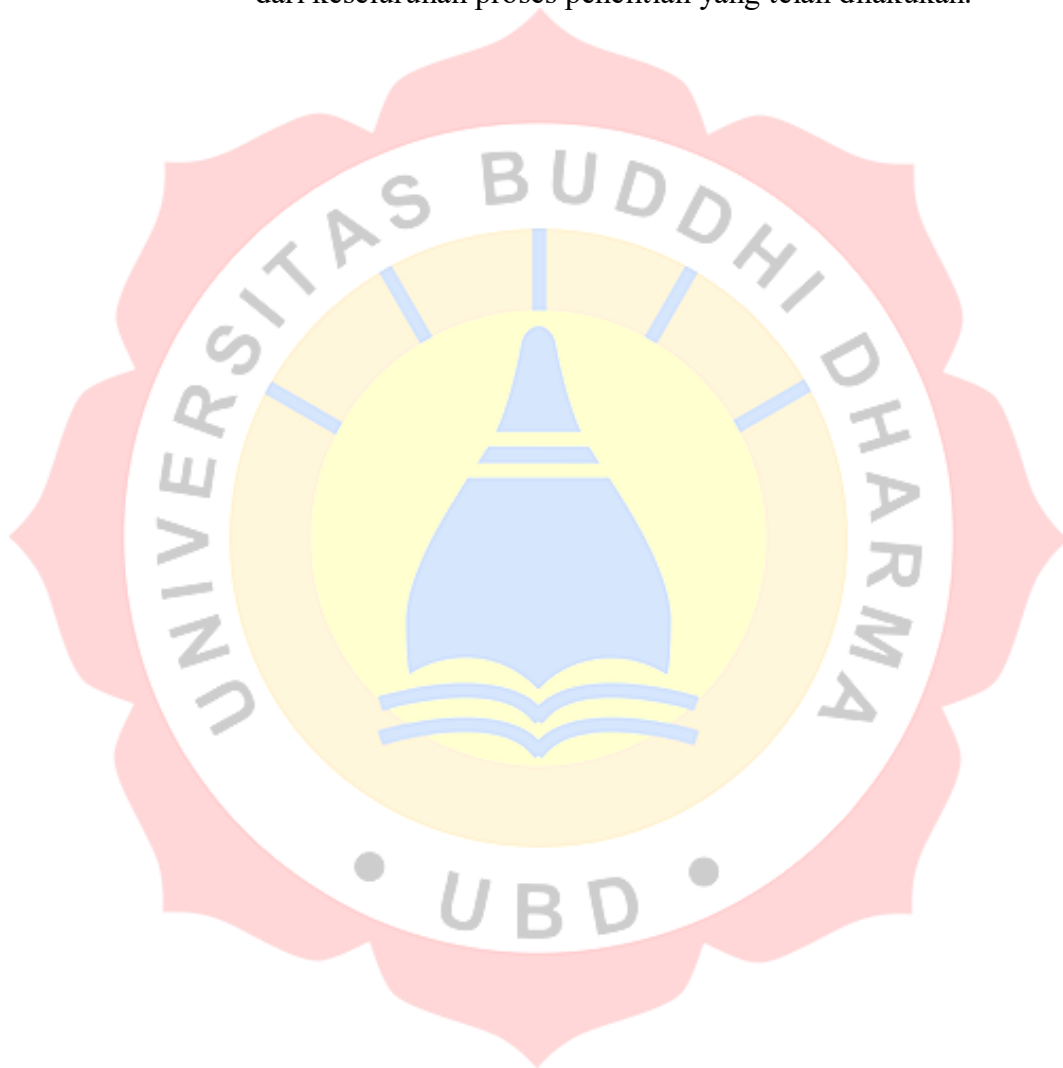
Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta interpretasi temuan penelitian. Data yang diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023 dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

**BAB V: PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi praktis dan teoritis, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Penutup menjadi refleksi dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. kinerja keuangan (Y)**

###### **a. Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan dapat mencapai tujuan finansialnya melalui aktivitas operasional dan strategi manajemen yang dijalankan. Dalam konteks perusahaan, kinerja keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang diukur melalui berbagai indikator keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional.

Evaluasi kinerja keuangan sangat penting bagi pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan kreditur. Manajemen perusahaan menggunakan informasi kinerja keuangan untuk mengevaluasi efektivitas strategi bisnis yang telah diterapkan dan untuk menyusun rencana keuangan di masa depan.

Menurut (Esomar, 2021), menyatakan bahwa :

“Bagi investor, kinerja keuangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi, karena mencerminkan profitabilitas dan potensi pertumbuhan perusahaan. Sementara itu, kreditur menggunakan kinerja keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya”.

Menurut Wiratna (2017), dalam (Lorenza, 2019), menyatakan bahwa :

“kinerja keuangan merupakan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah dilakukan, yang kemudian dibandingkan dengan standar atau kriteria yang telah disepakati bersama”.

Menurut Zein *et al.*, (2018), dalam penelitian (Extevanus & Habiburahman, 2024) menyatakan bahwa :

“kinerja keuangan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan calon investor dalam menentukan keputusan pembelian saham. Penilaian terhadap kinerja keuangan dilakukan melalui evaluasi dan analisis laporan keuangan guna mengetahui sejauh mana perusahaan mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dalam mengelola sumber daya serta menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya”.

### **b. Teori yang Mendukung Kinerja Keuangan**

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

#### 1) Teori Agency

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen sebagai pengelola perusahaan dan pemilik sebagai pemegang saham. Manajer cenderung memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, yang kadang tidak sejalan dengan tujuan pemegang saham. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kinerja keuangan menjadi penting dalam memastikan bahwa keputusan

manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham (Reysa et al., 2022).

### c. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan yang mencerminkan aspek profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan.

#### 1. Rasio Profitabilitas:

a) *Return on Assets* (ROA), yaitu Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mencetak laba.

b) *Return on Equity* (ROE), yaitu Mengukur tingkat pengembalian investasi pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Rasio ini penting bagi investor untuk melihat seberapa efektif manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari modal pemilik.

c) *Net profit margin* (NPM), yaitu Mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari total pendapatan perusahaan.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Mengukur berapa besar laba bersih dari setiap 1 rupiah penjualan. Cocok untuk menganalisis efisiensi biaya dan profitabilitas perusahaan.

2) Rasio Likuiditas:

a) *Current Ratio*, yaitu Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

$$\text{CR} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- Nilai > 1: perusahaan punya cukup aset lancar untuk membayar utang lancar.

- Nilai terlalu tinggi (>3) bisa berarti aset tidak digunakan secara efisien.

b) *Quick Ratio*, yaitu Mengukur likuiditas perusahaan dengan mengecualikan persediaan dari aset lancar.

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek tanpa harus menjual persediaan.

### 3) Rasio Solvabilitas:

- a) *Debt to equity ratio* (DER), yaitu Mengukur proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan.

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

- DER tinggi = Perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang daripada modal sendiri.

- DER rendah = Lebih konservatif, tetapi bisa juga berarti kurang agresif dalam memanfaatkan leverage.

- b) *Debt to asset ratio* (DAR), yaitu Mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- DAR tinggi = Sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang.

- DAR rendah = Lebih banyak aset berasal dari modal sendiri, lebih aman secara finansial

### 4) Rasio Aktivitas:

- a) *Total asset turnover* (TAT), yaitu Mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan.

$$\text{TAT} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi TAT, semakin efisien aset digunakan dalam menghasilkan pendapatan.

b) *Inventory turnover*, yaitu Mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengubah persediaan menjadi penjualan.

$$IT = \frac{HPP}{\text{Rata-Rata Persediaan}}$$

- Turnover tinggi = persediaan cepat terjual, efisien
- Turnover rendah = bisa berarti overstock atau penjualan lambat

5) Pengukuran Lainnya:

a) *Economic value added* (EVA), yaitu Mengukur nilai tambah ekonomi yang diciptakan oleh perusahaan.

$$EVA = NOPAT - (WACC \times \text{Total Invested capital})$$

- NOPAT = *Net Operating profit after tax* → laba operasi bersih setelah pajak
- WACC = *Weighted average cost of capital* → rata-rata tertimbang biaya modal
- *Total invested capital* = total dana yang digunakan perusahaan (utang + ekuitas operasional)

Jika EVA berada dalam kondisi positif perusahaan menciptakan nilai lebih dari biaya modalnya, sebaliknya jika

dalam posisi negatif perusahaan kurang menghasilkan dari modal yang di setor.

- b) *Market value added* (MVA), yaitu Mengukur nilai tambah perusahaan berdasarkan harga pasar sahamnya (Sutisna, 2020).

$$\text{MVA} = (\text{Harga Saham} \times \text{Jumlah Saham Beredar}) - \text{Total Ekuitas}$$

- MVA positif = pasar menilai perusahaan lebih tinggi dari modal yang disetor.

- MVA negatif = pasar menilai kurang, indikasi kurang performa atau kepercayaan pasar rendah.

#### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan**

Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, antara lain (Daryatno, 2022):

##### 1) Struktur Modal dan Leverage

Penggunaan utang dalam struktur modal dapat meningkatkan profitabilitas, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan.

##### 2) Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola yang baik dan kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan mengoptimalkan kinerja keuangan.

### 3) Ukuran Perusahaan dan Diversifikasi Bisnis

Perusahaan yang lebih besar dan memiliki diversifikasi bisnis yang luas cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil.

### 4) Efisiensi Operasional dan Manajemen Risiko

Pengelolaan biaya yang efisien dan strategi mitigasi risiko yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

## **e. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Keberlanjutan Perusahaan**

Kinerja keuangan yang baik memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan perusahaan.

### 1) Hubungan antara Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dan daya tarik lebih besar bagi investor.

### 2) Dampak Kinerja Keuangan terhadap Daya Saing Perusahaan

Kinerja keuangan yang sehat memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi dan ekspansi, yang meningkatkan daya saingnya di industri (Esomar, 2021).

### 3) Peran Kinerja Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Strategis

Manajemen perusahaan menggunakan informasi kinerja keuangan untuk merancang strategi bisnis yang lebih efektif dan

berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang (Syuhada, P., Muda, I., & Rujiman, 2020)

#### **f. Regulasi dan Standar dalam Pelaporan Kinerja Keuangan**

Di Indonesia, pelaporan kinerja keuangan perusahaan harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, perusahaan publik juga harus mematuhi standar internasional seperti International Financial Reporting Standards (IFRS).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan perusahaan yang terdaftar untuk mempublikasikan laporan keuangan secara berkala agar investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai kinerja perusahaan secara transparan (Lesmana et al., 2020).

## **2. Tarif Efektif Pajak ( $X_1$ )**

### **a. Pengertian Tarif Efektif Pajak**

Tarif Efektif Pajak (*effective tax rate* atau ETR) adalah ukuran yang menunjukkan persentase laba yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk pajak selama periode tertentu. Tidak seperti tarif pajak statutor (*statutory tax rate*) yang ditetapkan secara legal oleh pemerintah dalam undang-undang perpajakan, ETR mencerminkan tarif riil atau aktual yang dibayarkan oleh entitas usaha. ETR memberikan gambaran menyeluruh atas praktik perpajakan

perusahaan, karena mencakup strategi pengelolaan pajak dan efisiensi fiskal yang dijalankan dalam operasi sehari-hari.

Menurut (Syamsuddin & Suryarini, 2020), menyatakan bahwa :

“ETR merupakan rasio antara total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Ukuran ini mencerminkan seberapa besar proporsi laba perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak, sekaligus memberikan indikasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan berbagai insentif pajak yang tersedia”.

Menurut Gatot (2011), dalam (Susilawaty, 2020) menyatakan bahwa :

“tarif pajak efektif merupakan rasio antara beban pajak yang ditanggung dengan jumlah penghasilan kena pajak. Tarif ini berguna untuk mengetahui seberapa besar beban pajak yang sesungguhnya harus dibayarkan oleh Wajib Pajak”.

Menurut Rahmawati dan Mildawati (2019), dalam (Mahmudah et al., 2019), menyatakan bahwa:

“tarif pajak efektif dapat digunakan untuk menilai efektivitas manajemen pajak oleh manajer perusahaan. Semakin rendah tarif pajak efektif, semakin baik perusahaan dalam mengendalikan beban pajaknya”.

## **b. Pengukuran Tarif Efektif Pajak**

Efisiensi dalam pembayaran pajak oleh perusahaan umumnya dinilai melalui *effective tax rate* (ETR) atau tarif pajak efektif. Dengan demikian, ETR tidak hanya menunjukkan tingkat kewajiban perpajakan, tetapi juga mencerminkan efektivitas strategi manajemen pajak perusahaan. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, beberapa faktor utama yang dianggap berpengaruh

terhadap besar kecilnya ETR antara lain leverage, intensitas modal, dan intensitas persediaan.

Pertama, leverage digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal dan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangan baik jangka pendek maupun panjang (Murniati, 2022). Tingkat leverage yang tinggi sering dikaitkan dengan pengurangan beban pajak karena adanya pengurang pajak dari bunga pinjaman. Kedua, intensitas modal mencerminkan proporsi investasi perusahaan dalam aset tetap seperti bangunan dan mesin. Aset tetap ini umumnya dapat disusutkan dan berpotensi memberikan manfaat pajak (Aulia, N. A., & Ernandi, 2022). Oleh karena itu, semakin besar intensitas modal, bisa jadi semakin rendah ETR perusahaan. Ketiga, intensitas persediaan mengacu pada sejauh mana perusahaan mengalokasikan dananya untuk investasi dalam bentuk persediaan barang. Tingginya intensitas persediaan dapat mencerminkan karakteristik operasional tertentu yang juga turut mempengaruhi perhitungan beban pajak (Sujarwo & Sjahputra, 2022).

Dalam konteks analisis keuangan dan akuntansi, ETR menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. Investor, analis, dan otoritas pajak sering menggunakan ETR sebagai alat untuk menilai seberapa besar kepatuhan pajak dan potensi penghindaran pajak suatu entitas. ETR

juga berperan sebagai proksi untuk memahami sejauh mana perusahaan berhasil menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak (tax planning), baik yang legal maupun yang mendekati batas toleransi hukum.

Secara umum, perhitungan tarif efektif pajak dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Namun, terdapat variasi dalam pengukuran ETR yang umum digunakan antara lain (Widyasari, P. A., & Natalia, 2021):

1) Current ETR:

Menggunakan beban pajak kini (*current tax expense*) dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2) Cash ETR:

Menggunakan pembayaran pajak kas (*tax paid in cash*) dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pajak Dibayar Tunai}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3) GAAP ETR:

Menggunakan total beban pajak akuntansi (termasuk pajak tangguhan) dalam laporan keuangan.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tarif efektif pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Beberapa faktor utama antara lain (Sjahril et al., 2020):

1) Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks. Mereka juga memiliki kekuatan tawar terhadap otoritas pajak serta lebih mampu memanfaatkan celah hukum atau insentif fiskal.

2) Profitabilitas

Tingkat laba yang tinggi sering diasosiasikan dengan tarif pajak efektif yang lebih besar, karena dasar pengenaan pajaknya lebih tinggi. Namun, perusahaan yang sangat menguntungkan juga cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak.

3) Leverage (Rasio Utang)

Perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi akan membayar bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini menyebabkan pengurangan laba kena pajak dan menurunkan ETR.

#### 4) Intensitas Aset Tetap

Aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan memiliki implikasi terhadap depresiasi, yang juga memengaruhi laba kena pajak.

#### 5) Diversifikasi Operasi Global

Perusahaan multinasional seringkali memiliki fleksibilitas untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah melalui transfer pricing, lokasi IP rights, dan strategi lainnya.

#### 6) Regulasi dan Insentif Pajak

Pemerintah sering menyediakan insentif pajak untuk sektor tertentu, investasi R&D, atau daerah tertentu. Hal ini akan memengaruhi tingkat ETR yang dibayar oleh perusahaan yang memenuhi syarat tersebut.

Teori keagenan (*agency theory*), sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan bahwa dalam struktur organisasi modern, terdapat hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajer). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) (Ardini, 2022).

Dalam konteks perpajakan, konflik keagenan muncul ketika manajer memiliki insentif untuk meminimalkan beban

pajak demi menunjukkan kinerja laba yang tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kompensasi berbasis laba. Namun, strategi penghindaran pajak yang agresif (*tax aggressiveness*) tidak selalu sesuai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham karena berpotensi menimbulkan risiko hukum, kerusakan reputasi, dan denda administratif.

Insentif manajerial, seperti bonus berbasis laba bersih atau nilai pasar saham, menciptakan dorongan untuk mengoptimalkan ETR agar meningkatkan kinerja keuangan secara artifisial. Dalam beberapa kasus, insentif ini mendorong tindakan manipulatif seperti pergeseran waktu pengakuan pendapatan dan beban, penggunaan entitas khusus (*special purpose entities*), hingga transfer pricing lintas negara.

Namun, perusahaan yang diawasi secara ketat oleh investor institusional atau memiliki struktur tata kelola yang kuat cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang baik dapat membatasi kebebasan manajer dalam mengambil keputusan yang merugikan pemegang saham, termasuk strategi perpajakan yang terlalu agresif.

Dengan demikian, penghindaran pajak dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara struktur insentif, mekanisme pengawasan, dan lingkungan regulasi. Ketika insentif tidak

dikontrol secara tepat, manajer cenderung bertindak oportunistik dengan memanfaatkan celah hukum pajak demi kepentingan pribadi, yang pada akhirnya menurunkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

### **3. Beban Pajak Tangguhan (X<sub>2</sub>)**

#### **a. Pengertian Beban Pajak Tangguhan**

Beban Pajak Tangguhan merujuk pada beban yang timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba yang dihitung berdasarkan akuntansi (laba yang digunakan dalam laporan keuangan eksternal) dengan laba fiskal (laba yang menjadi dasar perhitungan pajak).

Beban pajak tangguhan diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan.

Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Dalam konteks ini, jika sebuah perusahaan mencatatkan beban pajak tangguhan yang lebih tinggi, hal tersebut menunjukkan adanya tingkat persistensi laba yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mencatatkan beban pajak tangguhan yang rendah (Nugraheni et al., 2023).

Menurut Fransiska Gwenda (2016), dalam (Extevanus & Habiburahman, 2024) menyatakan bahwa :

“pajak tangguhan diatur dalam PSAK No. 46 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan, yang mencakup beban pajak kini

dan beban pajak tanggungan. Secara umum, pajak tanggungan muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan waktu (temporer) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan. Pengakuan pajak tanggungan dapat berdampak pada penurunan laba bersih jika yang diakui adalah beban pajak tanggungan, atau sebaliknya, dapat mengurangi rugi bersih apabila yang diakui adalah manfaat pajak tanggungan. Beban pajak tanggungan sendiri timbul akibat adanya perbedaan temporer yang dikenakan pajak.”

Menurut (Susilawaty, 2020) meyakini bahwa :

“Beban pajak tanggungan adalah jumlah pajak penghasilan (PPH) yang harus dibayarkan di masa mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang dikenakan pajak. Beban ini diklasifikasikan berdasarkan jenis perbedaan yang terjadi, yaitu perbedaan permanen, perbedaan temporer, pajak yang bersifat final, serta biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan (*nondeductible expense*)”.

Menurut Kusumawati, (2020), dalam Winata & Winata, menyatakan bahwa:

“Beban pajak tanggungan muncul akibat adanya perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan akuntansi dengan saat dampak pajaknya diakui, di mana laba fiskal lebih besar dibandingkan laba akuntansi.”

#### **b. Pengukuran Beban Pajak Tanggungan**

Beban pajak tanggungan yang lebih tinggi juga mencerminkan perbedaan yang lebih besar antara laba komersial dan laba fiskal. Laba fiskal, pada gilirannya, dapat mencerminkan hasil dari perhitungan laba akuntansi yang dipengaruhi oleh perilaku manajemen dalam proses akrual. Ketika nilai beban pajak tanggungan tinggi, hal ini menggambarkan adanya peningkatan keuntungan yang disebabkan oleh unsur akrual yang diakui, dan unsur-unsur tersebut akan mengalami pembalikan pada periode berikutnya. Pembalikan

akrual ini akhirnya menyebabkan laba yang tercatat menjadi lebih rendah (Tania & Iskandar, 2021). Rumus yang digunakan untuk beban pajak tangguhan menurut (Devitasari, 2022) adalah:

$$DTE = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Aset } t-1}$$

Beban pajak tangguhan merupakan elemen dalam laporan keuangan yang mencerminkan perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi dan fiskal atas pendapatan atau beban, yang akan memengaruhi jumlah pajak yang dibayar di masa depan. Dalam konteks akuntansi keuangan, beban pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan laba fiskal yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Beban ini tidak merepresentasikan arus kas aktual pada periode berjalan, melainkan mencerminkan estimasi kewajiban atau aset pajak yang akan terealisasi di periode mendatang.

Beban pajak tangguhan merupakan komponen dalam laporan laba rugi yang mencerminkan pengaruh dari perbedaan temporer antara dasar pengakuan akuntansi dan dasar pengenaan pajak atas pendapatan dan beban. Beban ini tidak mencerminkan pembayaran pajak yang aktual pada periode berjalan, melainkan bersifat estimatif dan akan direalisasikan di masa mendatang dalam bentuk aset atau liabilitas pajak tangguhan. Dalam konteks akuntansi modern, beban

pajak tangguhan muncul sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip accrual basis dalam penyusunan laporan keuangan yang berbeda dengan sistem perhitungan laba kena pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang menggunakan pendekatan cash basis secara parsial.

Menurut PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan atau terutang pada periode masa depan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau kena pajak, dan akumulasi rugi fiskal yang belum dikompensasikan. Dengan demikian, beban pajak tangguhan adalah bagian dari total beban pajak yang diakui dalam suatu periode yang berasal dari perubahan saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan. Konsep ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih wajar dan akurat mengenai posisi keuangan perusahaan serta konsistensi antara beban pajak yang diakui dan aktivitas ekonomi yang melatarbelakanginya.

Konsep Perbedaan Temporer vs Permanen dan PSAK yang Relevan

Dalam praktik akuntansi pajak, dikenal dua jenis perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara dasar pengakuan aset dan liabilitas menurut standar akuntansi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya, yang sifatnya akan berbalik pada periode-

periode mendatang. Misalnya, perbedaan metode penyusutan aktiva tetap antara metode garis lurus (*straight-line*) menurut akuntansi dan metode saldo menurun (*declining balance*) menurut fiskal. Dalam hal ini, nilai buku dan dasar fiskal dari aset akan berbeda pada awalnya, tetapi akan menyatu kembali setelah umur ekonomis berakhir (Rofiani, V., Probowulan, D., & Aspirandi, 2020).

Sebaliknya, perbedaan permanen (*permanent differences*) adalah selisih yang tidak akan pernah kembali atau diperbaiki pada masa depan karena sifatnya yang final dan tidak dapat ditunda. Contoh perbedaan permanen adalah biaya yang menurut fiskal tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, seperti denda pajak, sumbangan sosial tertentu, atau hibah. Perbedaan ini tidak akan menimbulkan pajak tangguhan karena tidak berdampak pada perhitungan aset atau liabilitas pajak di masa mendatang (Rofiani, V., Probowulan, D., & Aspirandi, 2020).

PSAK No. 46 menegaskan bahwa pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan dilakukan menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*), bukan pendekatan laba rugi (*income statement approach*). Artinya, entitas harus membandingkan nilai tercatat aset dan liabilitas di laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Jika terdapat selisih yang bersifat temporer, maka entitas harus mengakui dampaknya dalam bentuk aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) atau liabilitas pajak tangguhan

(*deferred tax liability*), tergantung pada apakah selisih tersebut akan mengurangi atau menambah pajak yang terutang di masa depan.

Beban pajak tangguhan memainkan peran penting dalam strategi perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan dan memiliki implikasi signifikan terhadap persepsi investor serta pengukuran kualitas laba. Dalam perencanaan pajak, perusahaan dapat mengatur waktu pengakuan pendapatan atau beban sehingga menciptakan perbedaan temporer yang mengarah pada pembentukan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Strategi ini, selama dijalankan dalam kerangka legal dan sesuai regulasi perpajakan, dapat menjadi cara yang sah untuk mengelola arus kas dan efisiensi beban pajak antar periode (Puspito, G. W. C., & Karlina, 2023).

Di sisi lain, pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan sangat bergantung pada ekspektasi laba masa depan. Aset pajak tangguhan hanya dapat diakui jika terdapat keyakinan bahwa entitas akan memperoleh laba kena pajak yang cukup di masa datang untuk memanfaatkan pengurangan pajak tersebut. Dengan demikian, manajemen perlu membuat estimasi yang wajar dan konservatif mengenai proyeksi laba, yang pada akhirnya mencerminkan optimisme atau kehati-hatian mereka terhadap kondisi ekonomi dan prospek bisnis.

Oleh karena itu, beban pajak tangguhan tidak hanya mencerminkan penyesuaian akuntansi teknis, tetapi juga berfungsi

sebagai sinyal informasi bagi para pemangku kepentingan eksternal. Investor dan analis keuangan dapat menilai bagaimana manajemen mengelola ekspektasi laba, risiko fiskal, dan stabilitas keuangan perusahaan melalui dinamika perubahan beban pajak tangguhan dari tahun ke tahun. Perubahan yang signifikan dalam beban ini juga dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam strategi perpajakan, perubahan kebijakan akuntansi, atau perubahan estimasi manajemen terhadap laba fiskal di masa mendatang.

Dengan demikian, kajian terhadap beban pajak tangguhan tidak hanya penting dalam konteks akuntansi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen analisis dalam menilai efisiensi pajak, kualitas laba, dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

#### **4. Beban PPh 21 (X<sub>3</sub>)**

##### **a. Pengertian Beban Pph 21**

PPh 21 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, yang dihasilkan dari pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemberi kerja. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang bekerja, baik dalam status karyawan tetap maupun tidak tetap, baik dalam bentuk gaji, honorarium, tunjangan, upah, bonus, atau pembayaran lainnya

yang bersifat sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. PPh 21 memiliki sifat yang final, yang berarti pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan, dan disetorkan kepada negara.

Menurut (Munthe et al., 2024), menyatakan bahwa :

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, baik itu karyawan, penerima pensiun, maupun pihak lain yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pajak ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perpajakan nasional karena berperan langsung sebagai sumber penerimaan negara”.

Menurut (Nawangarsi & Diah Widajantie, 2356) meyakini bahwa :

“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan berbagai bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan, atau jasa yang dilakukan”.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, dalam (Wahidah, 2019), menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun bentuk pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau aktivitas tertentu”.

#### **b. Pengukuran Beban Pph 21**

PPh Pasal 21 dikenakan atas berbagai bentuk penghasilan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, serta fasilitas lain yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang

diberikan. Penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan formal di perusahaan, pekerjaan lepas, maupun usaha sampingan. Salah satu ciri utama dari PPh Pasal 21 adalah sistem pemungutannya yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung atau *withholding tax*, di mana pemberi kerja berkewajiban memotong pajak dari penghasilan sebelum disalurkan kepada penerima, dan kemudian menyetorkan pajak tersebut kepada negara (WIDIYATMAJA, 2022).

Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak secara lebih cepat dan efisien tanpa harus menunggu pelaporan atau pembayaran langsung dari wajib pajak. Selain itu, penerapan tarif progresif pada PPh Pasal 21, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan, bertujuan menciptakan keadilan fiskal. Artinya, mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan dikenai pajak lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah.

Setiap bulan, pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk menghitung, memotong, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang oleh karyawan atau penerima penghasilan lain berdasarkan tarif yang berlaku yaitu menggunakan estimasi tarif sebesar 5% dari gaji dan tunjangan yang tertera didalam laporan laba rugi maupun catatan atas laporan keuangan (rinciannya). Dalam pelaksanaannya, PPh Pasal 21 juga mencakup berbagai ketentuan teknis mengenai

perhitungan penghasilan kena pajak, pemotongan khusus, pelaporan, serta sanksi jika terjadi pelanggaran.

Pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk pengurangan tarif atau pembebasan sebagian kewajiban pajak kepada kelompok tertentu, seperti pekerja dengan penghasilan rendah atau mereka yang memenuhi syarat tertentu sesuai regulasi. Tujuannya adalah untuk mendukung perlindungan sosial serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar kerja formal.

Lebih jauh, PPh Pasal 21 tidak hanya berperan sebagai alat pemungutan pajak, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dan sosial yang berkontribusi dalam pembiayaan berbagai program publik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial. Dengan demikian, keberadaan PPh Pasal 21 sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mendorong pemerataan pembangunan.

Subjek pajak dalam PPh Pasal 21 mencakup individu yang menerima penghasilan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa, baik sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun pekerja lepas. Termasuk juga dalam kategori ini adalah penerima pesangon, pensiun, atau manfaat pensiun dari program asuransi sosial seperti THT dan JHT, serta ahli waris mereka. Selain itu, individu yang bukan merupakan pegawai tetap, seperti konsultan

dan profesional lepas, juga termasuk sebagai subjek pajak (Munthe et al., 2024).

Objek pajak dalam PPh Pasal 21 mencakup hampir semua jenis penghasilan yang diterima individu sebagai hasil dari pekerjaan, jabatan, atau jasa. Mulai dari gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, bonus tahunan, insentif kinerja, hingga komisi penjualan, semuanya merupakan objek pajak yang dihitung sebagai dasar pemotongan. Bahkan penghasilan dari pemutusan hubungan kerja seperti pesangon, serta manfaat pensiun juga termasuk sebagai objek pajak, karena dianggap sebagai imbalan atas hubungan kerja yang telah berlangsung sebelumnya (Harahap, 2023).

Melalui pengenaan pajak atas berbagai bentuk penghasilan ini, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan layanan publik, sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa PPh 21 juga berperan dalam sistem pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PPh 21 berfungsi untuk membiayai berbagai program dan kebijakan publik. Oleh karena itu, setiap pemotongan dan penyetoran PPh 21 harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, agar tidak hanya menciptakan keadilan bagi tenaga kerja, tetapi juga mendukung keberlanjutan fiskal negara.

Secara langsung, PPh 21 yang dipotong dan disetorkan oleh perusahaan menjadi salah satu komponen biaya yang harus dipenuhi. Meskipun perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak, pengelolaan PPh 21 yang tidak efisien dapat menambah beban administratif dan akuntansi yang harus ditanggung perusahaan. Misalnya, perusahaan harus memastikan penghitungan pajak yang tepat, pemotongan yang sesuai dengan tarif, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Semua proses ini membutuhkan alokasi sumber daya yang tidak sedikit, baik dalam bentuk tenaga kerja yang terlatih maupun sistem teknologi informasi yang dapat mendukung pengelolaan pajak secara efisien.

## **5. Pajak Final (X<sub>4</sub>)**

### **a. Pengertian Pajak Final**

Dalam sistem ini, penghasilan yang dikenai pajak final tidak diperhitungkan kembali dalam penghitungan penghasilan kena pajak secara keseluruhan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian, setelah pajak dibayarkan, kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut dianggap selesai. Ketentuan mengenai pajak final diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini menetapkan pengenaan pajak final terhadap wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi batas tertentu, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut (Wekasih, 2025), menyatakan bahwa :

“Pajak final merupakan salah satu skema pemajakan dalam sistem perpajakan Indonesia yang memiliki karakteristik khusus, yakni bersifat final dan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang”.

Menurut Mardiasmo (2019:201), dalam (Keren Kowaas et al., 2022), menyatakan bahwa :

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu subjek pajak dalam negeri, yang berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta berbagai jenis pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau aktivitas tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Menurut (Wahyudi & Nuryanah, 2024), menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan Final untuk UMKM (PPh Final UMKM) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pelaku UMKM, yaitu penghasilan dari kegiatan usaha oleh Wajib Pajak yang memiliki jumlah peredaran bruto tertentu”.

#### **b. Pengukuran Pajak Final**

Sifat finalitas dari pajak ini memberikan implikasi administratif dan fiskal yang signifikan. Dari segi administratif, pajak final dirancang untuk menyederhanakan mekanisme perpajakan, baik dalam hal perhitungan, pelaporan, maupun pembayaran pajak.

Dalam skema ini, pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Hal ini secara substansial mengurangi beban administrasi perpajakan, khususnya bagi wajib pajak yang belum memiliki sistem pencatatan dan pembukuan yang memadai. Selain itu, tarif pajak final yang bersifat tetap dan proporsional terhadap penghasilan bruto memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak dalam merencanakan kewajiban perpajakannya (Putri & Wijaya, 2022).

Meskipun demikian, penerapan pajak final juga memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi representasi fiskal dalam laporan keuangan perusahaan. Karena pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto tanpa memperhitungkan laba bersih, perusahaan yang berada dalam kondisi rugi secara komersial tetap diwajibkan membayar pajak, adapun yang termasuk dalam pengukuran pajak final ini yaitu dari bunga deposito yang dikenakan tarif 20%, sewa tanah atau bangunan tarif pajak 10%, obligasi pemerintah (dalam negeri) tarifnya 10%, keuntungan penjualan tanah atau bangunan dengan tarif 2,5%. Hal ini menimbulkan potensi distorsi dalam pengukuran efisiensi fiskal perusahaan, serta dapat memengaruhi analisis kinerja keuangan yang berbasis pada laba bersih, seperti *return on equity* (ROE), *return on assets* (ROA), dan *net profit margin* (NPM). Dalam konteks ini, beban pajak yang tidak

sebanding dengan kemampuan laba aktual perusahaan dapat menurunkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan.

Dari perspektif teori keagenan, struktur pajak final juga dapat memengaruhi relasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Ketika beban pajak tidak berkorelasi dengan kinerja aktual perusahaan, manajemen mungkin tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi operasional, karena kewajiban pajak tidak berubah secara signifikan seiring dengan peningkatan atau penurunan laba. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan insentif yang dapat berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, dalam konteks teori sinyal (*signaling theory*), keberadaan beban pajak yang tetap meskipun perusahaan mengalami kerugian dapat memberikan sinyal negatif kepada investor mengenai kondisi keuangan dan efisiensi fiskal perusahaan.

Pajak final juga membatasi fleksibilitas dalam pelaporan pajak. Wajib pajak yang memilih skema final tidak dapat memanfaatkan fasilitas kompensasi kerugian fiskal maupun insentif pajak lainnya yang tersedia dalam skema umum. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi strategis terhadap pilihan rezim perpajakan yang digunakan. Pemilihan skema perpajakan harus mempertimbangkan kondisi keuangan, strategi bisnis jangka panjang, dan implikasi terhadap laporan keuangan.

Secara konseptual, penerapan pajak final menunjukkan pergeseran pendekatan dari basis laba (*profit-based taxation*) ke basis omzet (*gross-revenue-based taxation*). Pendekatan ini lebih menekankan pada kemudahan administratif dibandingkan dengan akurasi fiskal. Meskipun memberikan keuntungan dalam bentuk penyederhanaan, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam merefleksikan kemampuan ekonomi aktual perusahaan. Oleh karena itu, dalam kajian ini, pajak final diposisikan sebagai salah satu variabel independen yang diasumsikan dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, baik secara langsung melalui struktur beban pajak, maupun secara tidak langsung melalui persepsi efisiensi fiskal dan kualitas pelaporan keuangan.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak final memiliki peran yang penting namun kompleks dalam sistem perpajakan dan pelaporan keuangan perusahaan. Keberadaannya memerlukan perhatian khusus dalam penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor perpajakan terhadap kinerja keuangan, terutama dalam sektor manufaktur yang memiliki dinamika penghasilan dan beban operasional yang cukup beragam.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi ini, yang berfokus pada pengaruh variabel pajak terhadap manajemen

laba dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian-penelitian yang dikaji mencakup berbagai aspek, seperti pengaruh beban pajak kini, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, serta perencanaan pajak terhadap manajemen laba dan PPh badan terutang. Selain itu, ada pula penelitian yang menganalisis pengaruh insentif PPh final dan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK terhadap kinerja keuangan, khususnya pada sektor-sektor tertentu, seperti manufaktur, makanan dan minuman, serta UMKM. Tabel berikut menyajikan hasil-hasil utama dari masing-masing penelitian, yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai hubungan antara pajak dan kinerja keuangan perusahaan dalam konteks pasar Indonesia.

**Tabel II. 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Hidayah & Suryarini, 2020)	Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif.	Variabel Dependen: - Manajemen Pajak.  Variabel Independen: - Faktor Keuangan - Non Keuangan.	- Faktor keuangan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak - Non keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap

				manajemen pajak.
2	(Sirait, 2021)	Pengaruh Koneksi Politik dan Tarif Efektif Pajak terhadap Kinerja Keuangan dengan Pergerakan Harga Saham sebagai Pemoderasi.	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja Keuangan.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koneksi Politik</li> <li>- Tarif Efektif Pajak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>- ETR tidak berpengaruh.</li> <li>- Harga saham memoderasi koneksi politik tapi tidak memoderasi ETR.</li> </ul>
3	(Wulandari & Stiawan, 2023)	Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Intensitas Persediaan dan Kepemilikan Mayoritas terhadap Tax Avoidance.	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tax Avoidance.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif Pajak Efektif</li> <li>- Intensitas Persediaan</li> <li>- Kepemilikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ETR dan kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh signifikan</li> <li>- intensitas persediaan berpengaruh signifikan</li> </ul>

			Mayoritas.	terhadap tax avoidance.
4	(Kurniawan, 2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)	Variabel Dependen: - Manajemen Laba.  Variabel Independen: - Perencanaan Pajak - Beban Pajak Tangguhan - Ukuran Perusahaan.	- Perencanaan pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba - beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan.
5	Lamtama, S. (2023).	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Tekstil dan Garment.	Variabel Dependen: -Kinerja Keuangan.  Variabel Independen: - Beban Pajak	- Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

			Tanggungan.	
6	(Yuliza & Fitri, 2020).	Pengaruh Beban Pajak Tanggungan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba.	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik Manajemen Laba.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban Pajak Tanggungan</li> <li>- Perencanaan Pajak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.</li> </ul>
7	(Gulo & Mappadang, 2022).	Pengaruh Beban Pajak Tanggungan, Aset Pajak Tanggungan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Laba.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban Pajak Tanggungan</li> <li>- Aset Pajak Tanggungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</li> </ul>

			- Perencanaan Pajak.	
8	(Septianingrum, 2019).	Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Laba.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban Pajak Kini</li> <li>- Beban Pajak Tangguhan</li> <li>- Aset Pajak Tangguhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban pajak kini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</li> <li>- Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba</li> <li>- Aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</li> </ul>

9	(Julianti, 2023).	<p>Analisis Profitabilitas, Kinerja Keuangan Terhadap Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman</p>	<p>Variabel          Dependen:          - Pph Badan Terutang.</p> <p>Variabel          Independen:          - Profitabilitas          - Kinerja Keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GPM tidak berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang</li> <li>- OPM berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang</li> <li>- GPM dan OPM berpengaruh positif terhadap PPh Badan Terutang.</li> </ul>
10	(SAPUTRI, 2022)	<p>Pengaruh Insentif Pph Final dan Tingkat Pendapatan terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada saat Pandemi COVID-19</p>	<p>Variabel          Dependen:          - Kinerja Keuangan.</p> <p>Variabel          Independen:          - Insentif Pph Final          - Tingkat Pendapatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insentif PPh final dan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.</li> </ul>

11	(Adella et al., 2021).	<p>Analisis Penerapan Pengakuan Pendapatan PSAK72 dan Dampak terhadap Pajak Penghasilan Final dan Manajemen Laba pada Perusahaan Konstruksi</p>	<p>Variabel Dependen: - Penerapan Pengakuan Pendapatan PSAK72 - Dampak.</p> <p>Variabel Independen: - Pajak Penghasilan Final - Manajemen Laba.</p>	<p>- Penerapan PSAK 72 berdampak pada kontrak real estate, mengakibatkan penurunan pendapatan dan dorongan untuk manajemen laba.</p>
12	(Pradana, 2009).	<p>Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Rokok</p>	<p>Variabel Dependen: - Manajemen Laba.</p> <p>Variabel Independen: - Perencanaan Pajak - Beban Pajak Tangguhan.</p>	<p>- Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>

13	(Vandi, 2020).	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Perpajakan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Otomotif	<p>Variabel Dependen: - Manajemen Laba.</p> <p>Variabel Independen: - Aset Pajak Tangguhan - Beban Pajak Tangguhan - Perencanaan Perpajakan.</p>	<p>- Aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba</p> <p>- Beban pajak tangguhan dan perencanaan perpajakan berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>
14	(Purba, 2021).	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia	<p>Variabel Dependen: - Manajemen Laba.</p> <p>Variabel Independen: - Beban Pajak Tangguhan - Perencanaan Pajak.</p>	<p>- Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>

15	(Winata & Winata, 2023).	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Manajemen Laba	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Laba.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban Pajak Tangguhan</li> <li>- Perencanaan Pajak</li> <li>- Ukuran Perusahaan</li> <li>- Pertumbuhan Penjualan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen laba dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan</li> <li>- Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tidak berpengaruh.</li> </ul>
16	(N. Sari & Wi, 2022)	Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018 – 2021	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja Keuangan.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leverage</li> <li>- Ukuran Perusahaan</li> <li>- Struktur Modal</li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- Pertumbuhan Penjualan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leverage dan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>- Ukuran Perusahaan dan struktur modal tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.</li> </ul>

17	(Jonathan & Afa, 2023)	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Laba.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas</li> <li>- Leverage</li> <li>- Beban Pajak Tangguhan</li> <li>- Perencanaan Pajak</li> <li>- Ukuran Perusahaan.</li> <li>- Pertumbuhan Penjualan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba</li> <li>- Profitabilitas, Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</li> </ul>

18	(ASTARI et al., 2021)	<p>PENGARUH STRUKTUR MODAL, MANAJEMEN LABA, LIKUIDITAS DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN</p>	<p>Variabel Dependen: - Kinerja Keuangan.</p> <p>Variabel Independen: - Struktur Modal - Manajemen Laba - Likuiditas - Beban Pajak Tangguhan.</p>	<p>- Srtuktur Modal dan Manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>- Likuiditas dan Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</p>
19	(SETYANINGSIH et al., 2025)	<p>PENGARUH BEBAN PAJAK KINI, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, TAX TO BOOK RATIO, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN</p>	<p>Variabel Dependen: - Kinerja Keuangan.</p> <p>Variabel Independen: - Beban Pajak Kini - Beban Pajak Tangguhan - Tax To Book Ratio - Leverage.</p>	<p>- Beban Pajak kini, tax to book ratio, dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <p>- Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</p>

20	(Ramadhanty, 2023)	Pengaruh pajak tangguhan dan tax to book ratio terhadap kinerja perusahaan	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja Perusahaan.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Tangguhan</li> <li>- <i>Tax To Book Ratio.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan</li> <li>- <i>Tax to book ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</li> </ul>
21	(Sipayung & Ismail, 2021)	<p>PENGARUH PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA SUBSEKTOR ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2019</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja Perusahaan.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Tangguhan</li> <li>- Perencanaan Pajak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan</li> <li>- Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.</li> </ul>

22	(Kevin, 2022)	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)</p>	<p>Variabel Dependen: - Nilai Perusahaan.</p> <p>Variabel Independen: - Ukuran Perusahaan - Likuiditas - Profitabilitas.</p>	<p>- Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan</p> <p>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p>
23	(Wibowo et al., 2021)	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Opinion Shopping Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI</p>	<p>Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>Variabel Independen: - Ukuran Perusahaan - <i>Capital Intensity</i></p> <p>Variabel Intervening : - <i>Opinion Shopping</i>.</p>	<p>- Capital intensity berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

24	(Shinta Natalia, 2025)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Administrasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman Perpajakan</li> <li>- Kemudahan Administrasi Perpajakan</li> <li>- Insentif Pajak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kemudahan dalam administrasi perpajakan dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
25	(Kristina & Simbolon, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Perpajakan</li> <li>- Sanksi Pajak</li> <li>- Pelayanan Fiskus</li> <li>- Manfaat Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>

		di Kec.Cibodas Tangerang)		
26	(H. W. N. Sari, 2023)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017- 2021)	Variabel Dependen: - Penghindaran Pajak.  Variabel Independen: - Pertumbuhan Penjualan - Manajemen Laba - Komisaris Independen - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Institusional.	- Manajemen laba dan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

27	(Audina & Wibowo, 2022)	Pengaruh Gross Profit Margin (GPM), Current Ratio (CR), Inflasi, dan BI Rate Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Indeks LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2018-2020	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga Saham.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gross Profit Margin (GPM)</i></li> <li>- <i>Current Ratio (CR)</i></li> <li>- Inflasi</li> <li>- <i>BI Rate.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gross profit margin</i> dan <i>current ratio</i> berpengaruh terhadap harga saham</li> <li>- Inflasi dan <i>BI rate</i> tidak berpengaruh terhadap Harga saham.</li> </ul>
28	(Karina & Sutandi, 2019)	Pengaruh Return On Asset (Roa), Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth), Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar & Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Laba.</li> </ul> <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Return on Asset</i></li> <li>- Pertumbuhan Penjualan</li> <li>- <i>Leverage.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen laba</li> <li>- <i>Return on asset</i> dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</li> </ul>

Sumber : Hasil penelitian terdahulu

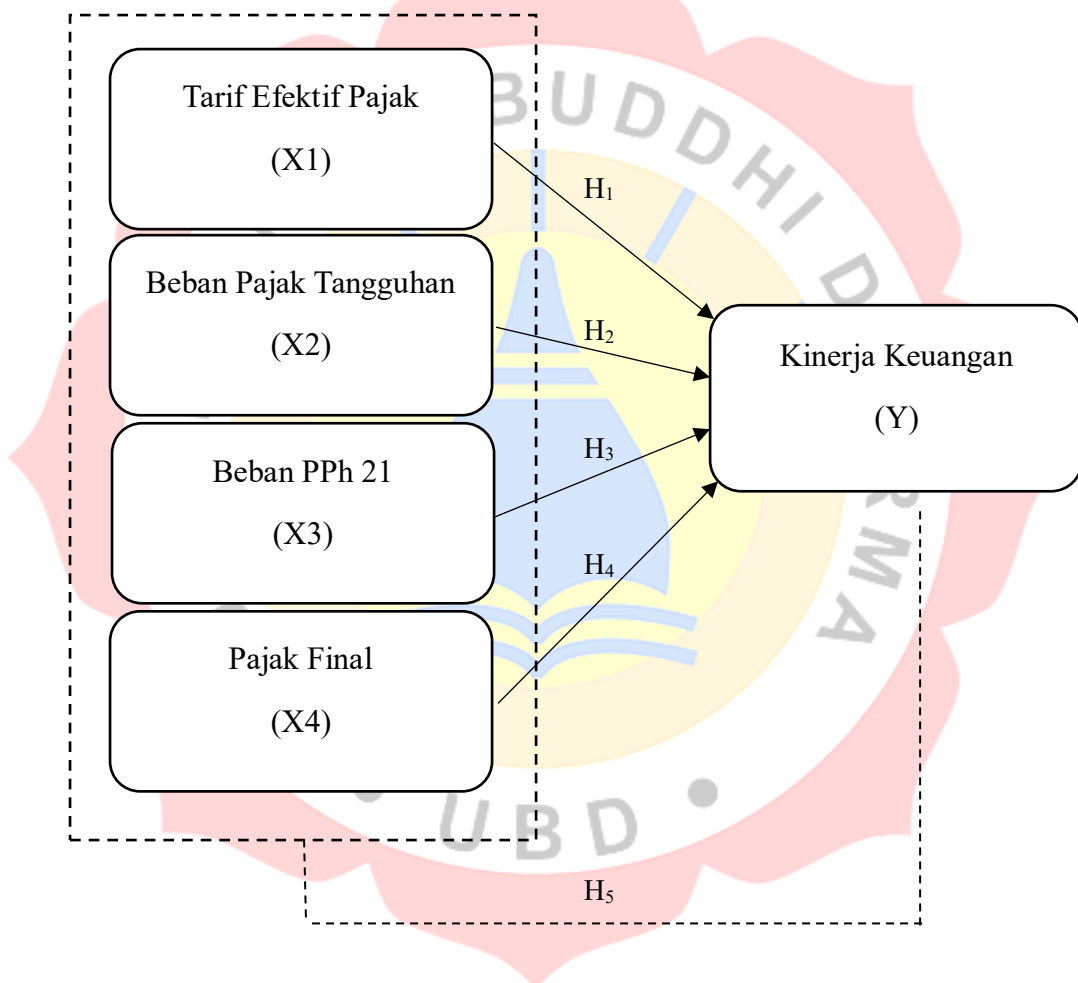
Penelitian terdahulu umumnya hanya menitikberatkan pada satu atau dua variabel perpajakan terhadap manajemen laba maupun kinerja keuangan, misalnya beban pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan (Lamtama, 2023; Sipayung & Ismail, 2021), tarif efektif pajak terhadap tax avoidance (Wulandari & Stiawan, 2023), atau insentif PPh final terhadap kinerja UMKM (Saputri, 2022). Penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi jumlah variabel yang diuji maupun sektor perusahaan yang diteliti. Berbeda dengan penelitian ini yang secara komprehensif memasukkan empat variabel independen, yaitu tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban PPh 21, dan pajak final, dengan fokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2023. Keempat variabel tersebut secara langsung diperkirakan memengaruhi kinerja keuangan, karena tarif efektif pajak ( $X_1$ ) berhubungan dengan beban pajak yang dibayar perusahaan dan pada akhirnya menentukan besarnya laba bersih; beban pajak tangguhan ( $X_2$ ) mencerminkan perbedaan temporer dalam pengakuan pajak yang dapat memengaruhi laporan laba rugi; beban PPh 21 ( $X_3$ ) berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang berdampak pada efisiensi biaya dan laba perusahaan; sedangkan pajak final ( $X_4$ ) merupakan beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan bersih. Hubungan ini sejalan dengan teori agensi, di mana manajer sebagai agen dituntut untuk mengelola kewajiban perpajakan secara optimal agar kinerja keuangan ( $Y$ ) tetap maksimal serta kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal dapat terjaga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dari studi sebelumnya, tetapi

juga memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai pengaruh faktor-faktor perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur.

### C. Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1

#### Kerangka Pemikiran



### D. Perumusan Hipotesa

#### 1. Tarif Efektif Pajak Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Tarif efektif pajak (ETR) mencerminkan proporsi beban pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak. ETR yang tinggi

dapat mengindikasikan beban pajak yang besar, yang berpotensi mengurangi laba bersih perusahaan. Sebaliknya, ETR yang rendah dapat menunjukkan efisiensi dalam perencanaan pajak, yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan

Penelitian oleh (Sirait, 2021) menemukan bahwa ETR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitiannya, Sirait menyatakan bahwa "Tarif efektif pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia."

Hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen pajak yang efektif, yang tercermin dari ETR yang optimal, dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan strategi perpajakan mereka untuk memastikan bahwa beban pajak tidak menghambat profitabilitas.

**H<sub>1</sub>: Diduga tarif efektif pajak berpengaruh Positif terhadap kinerja keuangan.**

## **2. Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan**

Beban Pajak Tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Beban ini mencerminkan kewajiban atau aset pajak yang akan direalisasikan di masa depan. Manajemen yang

efektif terhadap beban pajak tangguhan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan perusahaan.

Menurut penelitian oleh Ramadhanty dan Rusliansyah (2021), beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Mereka menyatakan bahwa "Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia."

Temuan ini menekankan pentingnya pengelolaan beban pajak tangguhan dalam strategi keuangan perusahaan. Dengan memahami dan mengelola beban ini secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

**H<sub>2</sub> : Diduga beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

### **3. Beban PPh 21 Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan**

Beban PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji dan upah karyawan. Beban ini dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, efisiensi dalam pengelolaan beban PPh 21 dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan strategi pengelolaan beban PPh 21, seperti melalui perencanaan pajak dan pemilihan metode perhitungan pajak yang efisien, untuk mengoptimalkan kinerja keuangan mereka

**H<sub>3</sub> : Diduga beban pph 21 berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

#### **4. Pajak Final Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan**

Pajak Final adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dan bersifat final, artinya tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan lainnya. Pengenaan pajak final dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan, terutama jika proporsi penghasilan yang dikenakan pajak final cukup besar.

Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan dampak pajak final dalam perencanaan keuangan mereka. Dengan memahami implikasi pajak final terhadap laba bersih, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengelola beban pajak dan meningkatkan kinerja keuangan.

**H<sub>4</sub> : Diduga pajak final berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

## **5. Tarif Efektif Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban PPh 21, dan Pajak Final Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan**

Kombinasi dari berbagai komponen pajak, seperti Tarif efektif pajak, Beban Pajak Tangguhan, Beban PPh 21, dan Pajak final, dapat secara kolektif mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Interaksi antara komponen-komponen ini dapat mencerminkan efisiensi manajemen pajak dan strategi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Hasil ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam manajemen pajak perusahaan. Dengan mengelola semua komponen pajak secara terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan mereka.

**H<sub>5</sub> : Diduga tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban pph 21, dan pajak final berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Pendekatan ini digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel bebas yang terdiri dari tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban PPh 21, dan pajak final terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan. Dengan pendekatan kuantitatif, data yang dikumpulkan berbentuk angka yang diolah menggunakan metode statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dan terukur (Waruwu et al., 2025).

Tujuan dari penelitian kausal adalah untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain (Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Abdullah, 2023). Dalam konteks ini, peneliti ingin melihat sejauh mana kebijakan dan beban perpajakan yang ditanggung perusahaan mampu memengaruhi performa keuangan perusahaan, khususnya di sektor manufaktur yang memiliki beban operasional dan struktur biaya yang kompleks. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2023.

Metode kuantitatif yang digunakan melibatkan analisis regresi linier berganda sebagai teknik utama untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun

simultan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris atas hubungan antara kebijakan perpajakan perusahaan dan kinerja keuangannya.

## B. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2023. Pemilihan sektor manufaktur didasarkan pada peran strategisnya dalam perekonomian nasional serta karakteristik operasionalnya yang kompleks, yang menjadikannya relevan dalam mengkaji aspek perpajakan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Industri manufaktur cenderung memiliki struktur biaya tetap yang besar, tenaga kerja yang padat, dan kewajiban pajak yang beragam, sehingga menjadi objek yang tepat untuk dianalisis secara mendalam dalam konteks penelitian ini.

Fokus utama dalam penelitian ini terletak pada elemen-elemen perpajakan perusahaan, yaitu tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban PPh 21, dan pajak final, serta indikator kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui rasio profitabilitas, khususnya *return on assets* (ROA). Keempat jenis pajak yang diteliti mencerminkan berbagai aspek kewajiban fiskal yang harus ditanggung perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan diduga memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya.

Melalui pengamatan terhadap laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan secara terbuka, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana beban dan strategi perpajakan memengaruhi kondisi keuangan perusahaan, serta bagaimana perusahaan merespons tekanan fiskal selama periode 2020–2023, termasuk saat dan setelah masa pandemi COVID-19 yang memberi tekanan signifikan terhadap dunia usaha.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum penelitian ini dilakukan. Data sekunder dipilih karena memiliki keunggulan dari segi efisiensi waktu, biaya, serta kelengkapan informasi yang sudah terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, data sekunder memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena empiris dengan cakupan waktu yang lebih luas dan tingkat objektivitas yang lebih tinggi, karena data berasal dari sumber resmi yang telah melalui proses audit dan pengesahan (Rosini & Adab, 2023).

Data yang dikumpulkan bersifat numerik dan terstruktur, yang sesuai dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini. Data kuantitatif memungkinkan dilakukan pengukuran yang presisi terhadap variabel-variabel yang diteliti serta mendukung analisis statistik inferensial untuk menguji hipotesis kausal. Dengan demikian, jenis data ini sesuai untuk menjawab tujuan utama penelitian, yakni menguji pengaruh antara variabel

bebas (tarif efektif pajak, beban pajak tangguhan, beban PPh 21, dan pajak final) terhadap variabel terikat (kinerja keuangan).

Adapun informasi yang dikumpulkan meliputi:

1. Data tarif efektif pajak, dihitung dari rasio antara beban pajak kini dan laba sebelum pajak.
2. Data beban pajak tangguhan, yang diambil dari laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan.
3. Data beban PPh 21, yang biasanya tercantum dalam pengungkapan beban pajak atau rincian beban pegawai.
4. Data pajak final, yang dapat ditemukan dalam catatan atas laporan laba rugi, khususnya jika perusahaan memiliki penghasilan dari sumber-sumber yang dikenai pajak final seperti sewa, jasa tertentu, atau bunga deposito.
5. Data kinerja keuangan, yang diukur dengan rasio *return on assets* (ROA), dihitung dari laba bersih dibagi total aset.

Semua data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan audited yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), website korporat perusahaan, atau sumber lain yang diakui keabsahannya seperti platform *financial statement aggregator* (misalnya RTI *business* atau *bloomberg* jika tersedia secara gratis). Laporan keuangan audited dipilih karena telah melalui proses audit oleh auditor independen, sehingga data yang diambil

dianggap sah, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan.

Periode data yang dianalisis adalah dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu periode empat tahun yang mencerminkan dinamika ekonomi pasca-pandemi COVID-19 serta pengaruh kebijakan fiskal yang berlaku pada masa tersebut. Rentang waktu ini dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan longitudinal terhadap hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini dapat secara lebih efisien mengeksplorasi hubungan antar variabel dalam skala luas tanpa harus melakukan survei atau eksperimen lapangan, namun tetap memperoleh hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **D. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2023. Terdapat 83 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023 dan memiliki tujuan untuk membandingkan keadaan perusahaan selama 4 tahun tersebut. Nama-nama perusahaan

yang menjadi populasi dalam penelitian ini akan ditampilkan pada Tabel III.1 di bawah ini.

**Tabel III. 1**

**Daftar Nama Perusahaan Manufaktur**

<b>NO</b>	<b>KODE EMITEN</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>
1	AALI	PT Astra Argo Lestari Tbk
2	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
3	AGAR	PT Asia Sejahtera Mina Tbk
4	AISA	PT FKS Food Sejahtera Tbk
5	ALTO	PT Tri Banyan Tirta Tbk
6	AMMS	PT Agung Menjangan Mas Tbk
7	ANDI	PT Andira Agro Tbk
8	ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
9	ASHA	PT Cilacap Samudera Fishing Indus Tbk
10	BEEF	PT Estika Tata Tiara Tbk
11	BISI	PT BISI International Tbk
12	BOBA	PT Formosa Ingredient Factory Tbk
13	BTEK	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk
14	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk
15	BWPT	PT Eagle High Plantation Tbk
16	CAMP	PT Campina Ice Cream Industry Tbk
17	CBUT	PT Citra Borneo Utama Tbk
18	CEKA	PT Citra Borneo Utama Tbk
19	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk
20	CMRY	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
21	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
22	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
23	CPRO	PT Central Proteina Prima Tbk
24	CRAB	PT Toba Surimi Industries Tbk

25	CSRA	PT Cisadane Sawit Raya Tbk
26	DEWI	PT Dewi Shri Farmindo Tbk
27	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
28	DPUM	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
29	DSFI	PT Dharma Samudera Fishing Industri Tbk
30	DSNG	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
31	ENZO	PT Moreno Abadi Perkasa Tbk
32	FAPA	PT FAP Agri Tbk
33	FISH	PT FKS Multi Agro Tbk
34	FOOD	PT Senta Food Indonesia Tbk
35	GOLL	PT Golden Plantation Tbk
36	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
37	GULA	PT Aman Agrindo Tbk
38	GZCO	PT Gozco Plantations Tbk
39	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
40	IBOS	PT Indo Boga Sukses Tbk
41	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
42	IKAN	PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
43	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
44	IPPE	PT Indo Pureco Pratama Tbk
45	JARR	PT Jhonlin Agro Raya Tbk
46	JAWA	PT Jaya Agra White Tbk
47	JPFA	PT Jafpa Comfeed Indonesia Tbk
48	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk
49	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
50	MAGP	PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk
51	MAIN	PT Malindo Feedmill Tbk
52	MKTR	PT Menthobi Karyatama Raya Tbk
53	MGRO	PT Mahkota Group Tbk

54	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
55	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
56	NASI	PT Wahana Inti Makmur Tbk
57	OILS	PT Indo Oil Perkasa Tbk
58	PALM	PT Provident Investasi Bersama Tbk
59	PGUN	PT Pradiksi Gunatama Tbk
60	PMMP	PT Panca Mitra Multiperdana Tbk
61	PSDN	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk
62	PSGO	PT Palma Serasih Tbk
63	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
64	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk
65	SIMP	PT Salim Ivomas Pratama Tbk
66	SIPD	PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk
67	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk
68	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
69	SMAR	PT Smart Tbk
70	SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
71	STAA	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk
72	STTP	PT Siantar Top Tbk
73	TAPG	PT Triputra Agro Persada Tbk
74	TAYS	PT Jaya Swarasa Agung Tbk
75	TBLA	PT Tunas Baru Lampung Tbk
76	TGKA	PT Tigaraksa Satria Tbk
77	TLDN	PT Teladan Prima Agro Tbk
78	TRGU	PT Cerestar Indonesia Tbk
79	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Co Tbk
80	UNSP	PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
81	WAPO	PT Wahana Pronatural Tbk
82	WMPP	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk

83	WMUU	PT Widodo Makmur Unggas Tbk
----	------	-----------------------------

Sumber : BEI, data di olah

Populasi dalam penelitian ini adalah 83 perusahaan sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2023. Sektor manufaktur dipilih karena memiliki karakteristik struktur biaya dan kewajiban perpajakan yang kompleks, serta kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Selain itu, sektor ini memiliki jumlah perusahaan yang relatif stabil dan data keuangannya tersedia secara publik, sehingga dapat dianalisis secara komparatif dan longitudinal.

## 2. Sampel

Jumlah keseluruhan populasi bersifat fluktuatif setiap tahunnya, karena adanya perusahaan baru yang masuk maupun perusahaan yang delisting. Oleh karena itu, peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menyaring populasi menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik sampling non-probabilitas yang dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu secara rasional dan teoritis agar sampel yang diambil relevan dengan tujuan penelitian (Ramdhan, 2021).

Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan merupakan bagian dari sektor manufaktur yang secara konsisten terdaftar di BEI selama periode 2020–2023.

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan dapat diakses oleh publik setiap tahun selama periode penelitian.
3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki kelengkapan data terkait beban pajak kini, pajak tangguhan, beban PPh 21, pajak final, laba bersih, dan total aset tersedia secara eksplisit dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian bersih secara berturut-turut selama periode penelitian, untuk menjaga validitas pengukuran rasio profitabilitas (ROA).
5. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang menerbitkan *annual report* secara berturut-turut selama periode 2020-2023

Sampel akhir yang diperoleh dari proses seleksi ini akan digunakan sebagai dasar pengolahan dan analisis data kuantitatif. Penentuan sampel dengan purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa setiap unit analisis dalam sampel memiliki karakteristik yang mendukung kelengkapan dan kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder melalui penelusuran dan pencatatan data yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk dokumen resmi. Pendekatan ini dilakukan karena penelitian bersifat kuantitatif dan menggunakan data historis yang tersedia secara publik melalui laporan keuangan tahunan perusahaan.

Data dikumpulkan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2023. Laporan keuangan yang menjadi sumber utama data diperoleh melalui situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan juga dari situs resmi masing-masing perusahaan. Selain itu, apabila diperlukan, sumber data juga dapat dilengkapi dari platform penyedia informasi keuangan lainnya yang kredibel dan sering dijadikan acuan dalam penelitian akademik, seperti RTI *Business* atau situs *agregator* data keuangan serupa.

Langkah-langkah dalam proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis, sebagai berikut:

1. Identifikasi dan seleksi perusahaan berdasarkan kriteria *purposive sampling*. Daftar perusahaan sektor manufaktur diunduh dari BEI, kemudian disaring sesuai dengan kriteria inklusi, seperti ketersediaan laporan keuangan lengkap dan konsistensi pencatatan selama empat tahun berturut-turut.

2. Unduh laporan keuangan tahunan dan audited untuk masing-masing perusahaan yang memenuhi kriteria. Laporan yang digunakan harus merupakan versi final yang telah diaudit oleh auditor independen, guna menjamin keandalan data yang dikutip.
3. Ekstraksi data numerik dilakukan dari laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Peneliti secara manual mencatat nilai-nilai yang relevan untuk masing-masing variabel, seperti:
  - a) Beban pajak kini dan laba sebelum pajak, yang digunakan untuk menghitung tarif efektif pajak (TEP).
  - b) Pajak tangguhan, baik sebagai beban maupun aset/liabilitas tangguhan, yang tercantum dalam laporan laba rugi atau neraca.
  - c) Beban PPh 21, yang jika tidak secara eksplisit disebutkan, ditelusuri melalui rincian beban kepegawaian dalam catatan atas laporan keuangan.
  - d) Pajak final, apabila tercantum sebagai komponen tersendiri atau dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.
  - e) Laba bersih dan total aset, yang digunakan untuk menghitung *return on assets* (ROA) sebagai indikator kinerja keuangan.
4. Verifikasi dan validasi data, yaitu melakukan pengecekan ulang atas data yang telah dicatat untuk menghindari kesalahan transkripsi atau interpretasi, terutama jika terdapat perbedaan format antar perusahaan atau antar tahun.

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dipilih karena memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, data yang digunakan telah melalui proses audit, sehingga menjamin akurasi dan validitasnya. Kedua, teknik ini memungkinkan peneliti untuk menjangkau cakupan data yang luas dalam jangka waktu relatif panjang tanpa perlu melakukan kontak langsung dengan perusahaan. Ketiga, dokumentasi memungkinkan dilakukan perbandingan yang objektif antar perusahaan dan antar tahun karena keseragaman bentuk pelaporan keuangan yang diatur oleh standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Susanto et al., 2023).

Penggunaan laporan keuangan audited juga memperkuat kredibilitas hasil penelitian, karena informasi yang terdapat dalam laporan tersebut telah diverifikasi oleh pihak independen. Hal ini penting dalam konteks penelitian kuantitatif yang mengedepankan objektivitas dan replikabilitas.

Secara keseluruhan, teknik dokumentasi dalam pengumpulan data memungkinkan penelitian ini untuk dilaksanakan secara efisien, akurat, dan mendalam, dengan tetap menjaga validitas internal dan eksternal dari hasil yang diperoleh.

## **F. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Operasionalisasi variabel merupakan langkah penting dalam penelitian kuantitatif karena bertujuan untuk menerjemahkan konsep-

konsep teoritis ke dalam bentuk indikator yang dapat diukur secara empiris. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari empat variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ) dan satu variabel dependen ( $Y$ ). Setiap variabel diukur menggunakan rumus atau indikator spesifik yang diambil dari data laporan keuangan, sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode statistik.

## 1. Variabel Dependen (Y)

### a. Kinerja Keuangan (Y)

Kinerja Keuangan (Y) diukur menggunakan rasio profitabilitas *return on assets* (ROA), yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. ROA dipilih karena mengukur efisiensi penggunaan aset secara keseluruhan, serta sangat relevan dalam menilai dampak pajak terhadap keberhasilan operasional perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Seluruh variabel yang telah dioperasionalkan akan diuji melalui metode statistik regresi panel, dengan terlebih dahulu dilakukan normalisasi atau transformasi jika diperlukan untuk memastikan data memenuhi asumsi klasik. Operasionalisasi ini penting untuk menjaga keakuratan dan konsistensi pengukuran antar unit analisis serta antar waktu.

## 2. Variabel Independen (X)

### a. Tarif Efektif Pajak ( $X_1$ )

Tarif efektif pajak mengukur beban pajak kini yang ditanggung perusahaan relatif terhadap laba sebelum pajak. Variabel ini menunjukkan seberapa besar proporsi laba perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak dalam periode tertentu.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

### b. Beban Pajak Tangguhan ( $X_2$ )

Beban pajak tangguhan mencerminkan selisih waktu pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi komersial dan fiskal. Pajak tangguhan bisa menjadi indikator strategi manajemen pajak yang memengaruhi arus kas dan kewajiban masa depan.

$$DTE = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan } t}{\text{Total Aset } t-1}$$

1. Indikator: Beban atau manfaat pajak tangguhan yang tercantum pada laporan laba rugi atau perubahan aset/liabilitas pajak tangguhan pada neraca maupun di catatan atas laporan keuangan.
2. Satuan: Dalam satuan rupiah (Rp) atau bisa dinyatakan sebagai proporsi terhadap total aset/laba untuk normalisasi.

### c. Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 (X<sub>3</sub>)

Beban PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan karyawan yang menjadi beban perusahaan sebagai pemotong dan penyeter pajak. Semakin besar beban ini, dapat menunjukkan struktur gaji yang tinggi atau jumlah karyawan yang besar, yang bisa berpengaruh terhadap efisiensi biaya dan profitabilitas.

1. Indikator: Beban PPh 21 yang dicatat dalam laporan keuangan atau catatan atas beban kepegawaian yang diambil dari total gaji dan tunjangan lalu dikalikan dengan tarif pajak 5% yaitu rata-rata konservatif untuk estimasi beban PPh 21 perusahaan. Penggunaan tarif estimasi 5% dalam pph 21 disebabkan karena tidak adanya rincian gaji karyawan dalam laporan keuangan tahunan.
2. Satuan: Rupiah (atau dapat dinormalisasi terhadap laba atau penjualan bersih).

### d. Pajak Final (X<sub>4</sub>)

Pajak final adalah pajak atas penghasilan tertentu yang dibayarkan secara final tanpa memperhitungkan tarif progresif. Misalnya, penghasilan dari sewa, bunga deposito, dan jasa tertentu. Besarnya pajak final dapat menunjukkan struktur penghasilan perusahaan dan strategi pengelolaan pajaknya.

1. Indikator: Jumlah pajak final yang dicatat secara eksplisit dalam laporan keuangan, diambil dari bunga deposito dikenakan tarif

20%, sewa tanah atau bangunan dikenakan tarif 10%, obligasi pemerintah dikenakan tarif 10%, penjualan tanah dikenakan tarif 2,5%.

2. Satuan: Rupiah atau rasio terhadap laba atau penjualan bersih.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang diukur menggunakan *return on assets* (ROA). Adapun variabel independen yang akan diuji meliputi tarif efektif pajak ( $X_1$ ), beban pajak tangguhan ( $X_2$ ), beban PPh 21 ( $X_3$ ), dan pajak final ( $X_4$ ). Kinerja keuangan yang menjadi variabel dependen, diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas *return on assets* (ROA), yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel (*panel data regression*), yang dianggap paling tepat mengingat karakteristik data yang digunakan, yaitu data *time series* (berkaitan dengan tahun) dan data *cross-section* (berkaitan dengan perusahaan).

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan analisis inferensial, langkah pertama yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik

data yang ada. Beberapa ukuran yang dihitung dalam statistik deskriptif meliputi (Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., 2024)

1. Mean (rata-rata), yang memberikan informasi mengenai nilai tengah dari masing-masing variabel. Ini akan membantu dalam memahami nilai rata-rata dari tarif efektif pajak, beban pajak tanggungan, beban PPh 21, pajak final, dan kinerja keuangan perusahaan selama periode penelitian.
2. Minimum dan maksimum untuk menunjukkan nilai ekstrim pada masing-masing variabel, yang penting untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya nilai pencilan (*outliers*) dalam data.
3. Standar deviasi, untuk melihat variasi atau penyebaran data dari nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasi, semakin besar pula variasi yang ada pada data tersebut.
4. Skewness dan kurtosis, untuk menilai distribusi data apakah cenderung simetris atau miring serta untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak.

Hasil dari statistik deskriptif ini akan memberikan gambaran awal tentang bagaimana distribusi data dalam penelitian, apakah data yang digunakan perlu dilakukan transformasi atau pemrosesan lebih lanjut, dan untuk mengevaluasi apakah ada nilai-nilai yang tidak wajar yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melanjutkan dengan analisis regresi panel, data yang digunakan dalam penelitian ini akan terlebih dahulu diuji untuk memenuhi asumsi-asumsi klasik dalam regresi linier. Pemenuhan asumsi ini penting untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan valid dan estimasi parameter yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan (Sholihah, S. M. A., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, 2023).

Asumsi-asumsi yang diuji adalah sebagai berikut:

### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2017), dalam (N. Sari & Wi, 2022), Uji normalitas merupakan teknik statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kumpulan data atau variabel memiliki pola distribusi yang mendekati distribusi normal. Uji ini penting dilakukan karena data yang berdistribusi normal cenderung memberikan hasil analisis yang lebih dapat dipercaya dibandingkan data yang menyimpang dari distribusi tersebut. Jika penyebaran data mengikuti arah garis diagonal dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, atau model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan penyebaran data tidak mengikuti garis diagonal, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

### **b. Uji Multikolinearitas**

Menuru Ghozali (2017), dalam (N. Sari & Wi, 2022), Uji ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dalam model regresi yang baik, variabel bebas seharusnya tidak saling berkorelasi. Adapun kriteria yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.
- 2) Namun, jika nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan VIF melebihi angka 10, maka menunjukkan adanya gejala multikolinearitas.

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan bahwa varians dari residual tetap konstan antar observasi. Ketidakkonsistenan varians (heteroskedastisitas) dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak efisien dan menghasilkan *standard error* yang bias. Pengujian dapat dilakukan dengan metode Breusch-Pagan atau White, dan jika terdeteksi heteroskedastisitas, solusi yang dapat digunakan adalah *regresi dengan robust standard errors*. Menurut Ghozali (2016), keberadaan heteroskedastisitas juga dapat dilihat melalui grafik *scatter plot*. Jika pola titik-titik membentuk pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas.

Sebaliknya, jika titik-titik tersebar acak di sekitar garis nol, maka tidak ada heteroskedastisitas. (Sholihah, S. M. A., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, 2023).

#### **d. Uji Autokorelasi**

Menurut Ghozali (2017), dalam (N. Sari & Wi, 2022), Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara nilai residual pada periode ke-t dengan nilai residual pada periode sebelumnya (t-1). Dalam analisis regresi, tujuan utamanya adalah untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, model regresi yang bebas dari autokorelasi lebih diutamakan. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Uji ini melibatkan perbandingan nilai statistik Durbin-Watson dengan batas bawah (dL) dan batas atas (dU) pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai Durbin-Watson  $dU < dW < 4-dU$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model tersebut.

### **3. Uji Statistik**

#### **a. Analisis Regresi Linier Berganda**

Menurut Ghozali (2017) dalam (N. Sari & Wi, 2022) Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen.

Selain itu, hasil dari analisis ini juga dimanfaatkan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang telah diketahui. Model regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam bentuk seperti berikut:

$$ROA = \alpha + \beta_1 ETR + \beta_2 DTE + \beta_3 \text{BEBAN PPH 21} + \beta_4 \text{PAJAK FINAL} + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : *Kinerja Keuangan*

X<sub>1</sub> : *Tarif Efektif Pajak*

X<sub>2</sub> : *Beban Pajak Tangguhan*

X<sub>3</sub> : *Beban Pph 21*

X<sub>4</sub> : *Pajak Final*

α : *Konstanta*

β<sub>1234</sub> : *koefisien regresi*

ε : *Error*

#### b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Menurut Ghozali (2017) dalam (N. Sari & Wi, 2022) Salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen adalah koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol hingga satu, dan dianggap signifikan secara statistik dalam mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Koefisien determinasi (*R<sup>2</sup>*) mencerminkan seberapa kuat keterkaitan antara kedua jenis

variabel tersebut. Nilai  $R^2$  sebesar 0 menunjukkan tidak adanya hubungan, sedangkan nilai 1 menunjukkan hubungan yang sempurna. Jika dalam suatu model regresi terdapat lebih dari dua variabel bebas, maka digunakan adjusted  $R^2$  ( $R^2$  yang disesuaikan) sebagai ukuran koreksi atau penyesuaian.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2017) dalam (N. Sari & Wi, 2022) Untuk mengevaluasi apakah koefisien dari variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dalam memprediksi variabel dependen, digunakan uji *t-statistik*. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Sebelum mengetahui hasil uji t, perlu diketahui nilai t tabel terlebih dahulu yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Df = n - k - 1$$

Keterangan :

N : jumlah sampel yang dipakai untuk penelitian

K : jumlah variabel independen penelitian yang dipakai

Pengambilan keputusan terhadap hipotesis dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y).
- 2) Namun, jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (X) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y).

#### **b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Menurut Ghozali (2017) dalam (N. Sari & Wi, 2022) Uji statistik F digunakan untuk menentukan apakah secara keseluruhan variabel-variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebelum mengetahui hasil uji F, perlu diketahui nilai F tabel terlebih dahulu yang didapatkan melalui rumus sebagai berikut :

$$Df(N_1) = k - 1$$

$$Df(N_2) = n - k$$

Keterangan :

N : jumlah sampel yang dipakai untuk penelitian

K : jumlah variabel independen penelitian yang dipakai

Sebelum menafsirkan hasil uji F, terdapat kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis, yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

- 2) Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka variabel independen (X) secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y).

